Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis

http://www.infeb.org

2025 Vol. 7 No. 3 Hal: 512-518 e-ISSN: 2714-8491

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan: Studi Komparatif Kawasan Indonesia Barat, Timur, Indonesia

Mutiara Lailatussubha[1]✉, M. Nazer[2]

[1,2]Universitas Andalas

lailatussubhamutiara@gmail.com

Abstract

In 2022, income inequality in Indonesia continued to show significant regional disparities, with Eastern Indonesia recording a Gini ratio of 0.346, higher than that of Western Indonesia at 0.345. This difference indicates that income distribution in the eastern region remains more uneven compared to the western region, highlighting the need for special attention to the underlying factors of inequality in both regions. Income inequality remains a major issue that hinders inclusive and sustainable development, particularly amid economic and social disparities between regions. This study aims to analyze the effects of financial inclusion, economic growth, education, and unemployment on income inequality in Western and Eastern Indonesia during the period 2008–2022. A quantitative approach is employed using the Random Effect Model panel data regression, with data processing conducted using STATA software. The results of the Random Effect Model regression show that in Western Indonesia, financial inclusion and economic growth have a positive and significant effect on income inequality, while education has a negative and significant effect, and unemployment does not have a significant impact. In Eastern Indonesia, education and unemployment have a negative and significant effect on income inequality, financial inclusion has a positive and significant effect, while economic growth does not affect income inequality in the region.

Keywords: Income Inequality, Financial Inclusion, Economic Growth, Education, Unemployment

Abstrak

Pada tahun 2022, ketimpangan pendapatan di Indonesia masih menunjukkan perbedaan signifikan antarwilayah, di mana Kawasan Indonesia Timur mencatat gini rasio sebesar 0,346, lebih tinggi dibanding Kawasan Indonesia Barat yang sebesar 0,345. Perbedaan ini mencerminkan bahwa distribusi pendapatan di wilayah timur masih lebih tidak merata dibandingkan wilayah barat, sehingga menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap faktor-faktor penyebab ketimpangan di kedua kawasan tersebut. Ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan utama yang menghambat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di tengah perbedaan karakteristik ekonomi dan sosial antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur selama periode 2008–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi data panel Random Effect Model dan pengolahan data dilakukan melalui aplikasi STATA. Berdasarkan hasil regresi Random Effect Model menunjukkan bahwa di Kawasan Indonesia Barat, inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan dan pengangguran di kawasan ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Di Kawasan Indonesia Timur, Pendidikan dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Indonesia Timur.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Inklusi Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

1. Pendahuluan

Keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, serta semakin rendahnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat di suatu daerah [1]. Ketimpangan pendapatan adalah distribusi pendapatan total yang tidak seimbang antara rumah tangga dalam suatu negara, dimana ketimpangan yang tinggi membuktikan distribusi pendapatan yang tidak seimbang di masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan adanya konflik sosial yang terjadi di masyarakat [2]. Ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan adanya konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

Menurut laman *Consumer News and Business Channel* (CNBC), yang dipublikasikan pada tanggal 1 Agustus 2024, data Survei Sosial Ekonomi Nasional mengkonfirmasi terjadinya perbedaan pertumbuhan pendapatan di masyarakat yang membuat kelas kaya semakin kaya dan kelas menengah jatuh miskin. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia tersebar di berbagai tempat tinggal, seperti di desa dan kota, tentu mempunyai tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda [3]. Kawasan Timur Indonesia masih menjadi perhatian utama pemerintah karena wilayah ini belum menunjukkan perkembangan yang setara dengan Kawasan Barat Indonesia. Keberagaman geografis,

Diterima: 28-07-2025 | Revisi: 10-08-2025| Diterbitkan: 15-08-2025 | doi: 10.37034/infeb.v7i3.1224

sosial, dan ekonomi di Indonesia menciptakan ketimpangan antarwilayah, terutama antara Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT) [4].

Kondisi perekonomian di Kawasan Barat Indonesia cenderung lebih maju dan stabil dibandingkan Kawasan Timur Indonesia. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan menggambarkan konsentrasi kepemilikan aset dan kendali atas aktivitas ekonomi pada kelompok tertentu, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak negatif, khususnya terhadap stabilitas sosial, politik, dan keamanan [5]. Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan menjadi salah satu tujuan utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan pendapatan dapat diukur menggunakan indikator gini ratio yang memiliki rentang nilai antara nol hingga satu. Berikut ini adalah gambar data gini rasio untuk Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur, dan Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya rata-rata gini rasio kawasan indonesia barat, kawasan indonesia timur, dan indonesia tahun 2018 – 2022 pada Gambar 1.

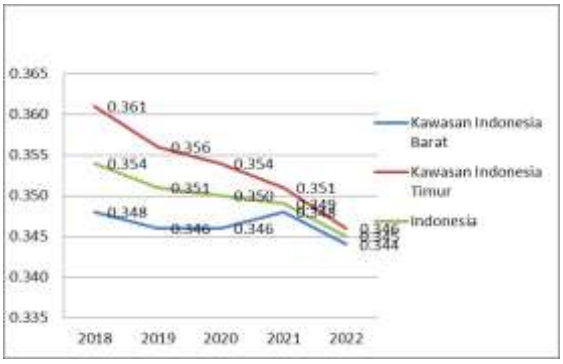

Gambar 1. Rata-rata Gini Rasio Kawasan Indonesia Barat,Kawasan Indonesia Timur, dan Indonesia tahun 2018 - 2022

Berdasarkan gambar 1, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka gini rasio pada ketiga kawasan menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2018 hingga 2022, dapat dilihat bahwa terjadi pola penurunan angka gini rasio di Indonesia sebesar 0.354 pada tahun 2018 menjadi 0.345 pada tahun 2022. Apabila melihat ketimpangan pendapatan menurut kawasan terdapat perbedaan antara Kawasan Indonesia Timur dan Kawasan Indonesia Barat. Pada Kawasan Indonesia Barat tercatat sebesar 0.348 lebih rendah dibandingkan Indonesia secara nasional, sedangkan di kawasan Indonesia Timur mencapai 0.361 lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hingga tahun 2022, kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur mengalami penurunan dengan nilai 0.344 dan 0.346.

Kawasan Indonesia Timur pada grafik merupakan wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi dibandingkan dengan Kawasan Indonesia Barat dan Nasional. Kawasan Timur Indonesia selama ini dianggap sebagai wilayah yang terbelakang dilihat dari pembangunan ekonomi karena pembangunan ekonomi selama ini lebih berorientasi pada Jawa dan beberapa wilayah di Kawasan Indonesia Barat (KIB) [6]. Pentingnya penelitian pada kawasan ini terletak pada pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan ketimpangan dan efektivitas kebijakan di setiap kawasan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat [7]. Pertumbuhan ekonomi yang pesat belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, karena pertumbuhan tersebut kadang justru berkontribusi pada ketimpangan dan distribusi pendapatan yang tidak merata, sehingga pemerataan tidak selalu terjamin. Kawasan Indonesia Barat umumnya memiliki PDRB yang lebih tinggi dibandingkan kawasan Indonesia Timur (BPS). Sebagai contoh, DKI Jakarta mencatat PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp 1,953,488.99 (milyar rupiah). Pada tahun 2022, yang umumnya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, didukung oleh infrastruktur yang lebih baik dan kontribusi sektor industri serta jasa yang signifikan.

Teori ketimpangan pendapatan dimulai semenjak munculnya hipotesis U-terbalik yang dikemukakan oleh Simon Kuznets pada tahun 1955. Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi akan terjadi distribusi pendapatan yang buruk, setelah itu ketika mencapai titik puncak pembangunan tertentu maka distribusi pendapatan akan mulai merata atau ketimpangan pendapatan akan menurun [8]. Ini menunjukkan adanya trade off, yaitu pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti oleh kesenjangan pendapatan yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu, kesenjangan tersebut mulai stabil dan menurun karena adanya kebijakan pemerintah dan aturan hukum yang ditujukan untuk mengatur kelompok berpenghasilan tinggi [9].

Pengembangan sektor keuangan, khususnya sektor perbankan, berperan penting dalam memperluas akses dan penggunaan layanan perbankan oleh masyarakat. Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting sebagai perantara dalam sistem keuangan, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Inklusi keuangan adalah suatu proses untuk membawa individu dalam perekonomian ke dalam sistem keuangan untuk memanfaatkan peluang, dimana produk dan layanan keuangan akan tersedia lebih luas dan masyarakat dengan pendapatan rendah akan mampu menemukan pendanaan dari sektor keuangan tersebut [10].

Faktor lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di suatu daerah adalah pengangguran, pengangguran yang tinggi cenderung meningkatkan ketimpangan karena kelompok yang menganggur tidak memiliki pendapatan [11]. Teori Keynes menjelaskan bahwa pengangguran terjadi ketika permintaan agregat tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2022, Kawasan Indonesia Barat (KIB) secara konsisten mencatat tingkat pengangguran yang lebih tinggi

dibandingkan Kawasan Indonesia Timur (KIT) maupun rata-rata nasional dengan angka 5.69%. Pengangguran akan berdampak langsung terhadap ketimpangan pendapatan ketika tingkat pengangguran tinggi, pendapatan terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki pekerjaan, sementara kelompok pengangguran semakin terpinggirkan secara ekonomi [12].

Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dan berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan keberhasilan pembangunan nasional karena pendidikan menunjukkan manfaat umum dari kinerja populasi suatu negara [13]. Pendidikan yang berkualitas memberikan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang dibutuhkan tenaga kerja dalam pasar global yang kompetitif. Teori modal manusia menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi dalam diri individu yang meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan potensi penghasilan di masa depan. Individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memperoleh penghasilan yang lebih tinggi karena mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat sekolah yang lebih tinggi maka akan mengurangi ketimpangan pendapatan di suatu daerah [13].

Penelitian yang menemukan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan yang menunjukkan bahwa satu persen kenaikan pertumbuhan PDB akan meningkatkan Index Gini secara rata-rata sebesar 0.082 sampai dengan 0.085 poin, dampak pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan insiden ketimpangan pendapatan tampaknya lebih besar pada negara berpenghasilan menengah bawah dan menengah atas dibandingkan dengan negara berpenghasilan tinggi [13]. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa terbukti pertumbuhan ekonomi secara signifikan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengurangi ketimpangan antar etnis di Malaysia [14].

Studi yang membahas pengaruh inlusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan menunjukan bahwa inklusi keuangan berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan yang akan berujung pada meluasnya ketimpangan pendapatan di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini terjadi pada pengaruh dimensi ketiga (*usability*) terhadap ketimpangan pendapatan, meskipun inklusi keuangan meningkat, apabila distribusi kredit dan simpanan hanya terkonsentrasi pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi maka akan meningkatkan kesenjangan pendapatan [15]. Temuan lainnya menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan akses terhadap layanan keuangan seperti bertambahnya jumlah rekening bank dan ATM dapat memberikan manfaat nyata bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan membuka peluang memperoleh tambahan penghasilan melalui aktivitas menabung maupun pemanfaatan kredit [16].

Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dan berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan keberhasilan pembangunan nasional karena pendidikan menunjukkan manfaat umum dari kinerja populasi suatu negara. Penelitian menemukan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga di Polandia masih menjadi penentu utama ketimpangan pendapatan, meskipun dampak "bonus pendidikan" telah menurun. Perbedaan tingkat pendidikan tetap menyumbang sekitar 16% terhadap ketimpangan pendapatan secara keseluruhan [12]. Pendidikan yang tidak merata dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia, untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, penting untuk meningkatkan pemerataan dalam akses pendidikan dan menciptakan kebijakan yang dapat memfasilitasi mobilitas sosial bagi seluruh lapisan masyarakat [17].

Penelitian menemukan bahwa pengangguran berkontribusi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Ketika tingkat pengangguran tinggi, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan cenderung mengalami kesulitan ekonomi yang lebih besar. Selain itu, pengangguran juga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan keterampilan dan kehilangan peluang karir yang berdampak pada kesenjangan pendapatan jangka panjang [18]. Penelitian mengenai ketimpangan pendapatan masih sangat penting bagi pemerintah daerah karena isu ini tetap menjadi tantangan utama dalam pembangunan wilayah, terutama mengingat masih adanya kesenjangan pendapatan antar wilayah, khususnya antara Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional yang merata.

Meskipun beberapa indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan distribusi kesejahteraan yang merata di seluruh kawasan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan apabila hasil pembangunan hanya terpusat di wilayah tertentu dan tidak dirasakan secara proporsional oleh seluruh kelompok masyarakat. Tingkat pengangguran yang masih tinggi, terutama di kawasan yang terpinggirkan, menjadi faktor yang dapat memperburuk ketimpangan karena rendahnya akses terhadap pekerjaan produktif. Pendidikan sebagai pilar penting pembangunan sumber daya manusia memiliki potensi besar dalam menciptakan kesetaraan peluang ekonomi, namun disparitas dalam akses dan kualitas pendidikan antarwilayah masih menjadi hambatan serius. Begitu pula dengan inklusi keuangan, yang idealnya mampu mendorong partisipasi ekonomi masyarakat secara lebih luas, akan tetapi masih belum optimal di banyak daerah, terutama di Indonesia Timur.

Penjelasan pada uraian di atas menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan pendapatan dan indikator-indikator makroekonomi seperti inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan pendidikan masih memerlukan analisis yang lebih mendalam, mengingat disparitas distribusi pendapatan masih terjadi secara nyata antara Kawasan Indonesia Timur dan Kawasan Indonesia Barat. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana pengaruh masing-masing indikator tersebut terhadap tingkat ketimpangan di kedua kawasan dan pada nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan data berbentuk angka dan dianalisis secara statistik. Pada penelitian ini digunakan data sekunder dan dianalisi dengan metode Panel Data yang merupakan gabungan dari data time series dan cross section. Penelitian ini mengambil cakupan wilayah penelitian pada provinsi provinsi yang berada di 17 Provinsi di Kawasan Barat Indonesia, 16 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia, dan 33 Provinsi di Indonesia. Pada Kawasan Barat Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali). Kawasan Timur Indonesia (Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua) dari tahun 2008 – 2022.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan dan variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inklusi Keuangan, Pengangguran, dan Pendidikan. Data yang digunakan merupakan data index bersumber dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. meliputi persentase penduduk miskin, pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran terbuka, dan angka melek huruf, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis Panel Data. Pada pengujian regresi data panel terdapat 3 pendekatan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Terdapat beberapa tahapan dalam analisis regresi data panel. Dimana tahap pertama dilakukan adalah Uji Pemilihan model terbaik, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Uji pemilihan model terbaik dilakukan untuk melihat model yang terpilih untuk melakukan regresi data panel. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian memenuhi syarat-syarat statistik yang diperlukan agar hasil estimasi valid, reliabel, dan tidak bias. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial maupun simultan mempengaruhi variabel dependen.

3. Hasil dan Pembahasan

Tahapan pertama yang dilakukan adalah melihat hasil dari uji pemilihan model terbaik. Uji pemilihan model terbaik dilakukan untuk melihat model apa yang terbaik dilakukan untuk menentukan model regresi data panel apa yang paling tepat untuk data yang dianalisis. Dibawah ini adalah tabel hasil Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *LM*. Selanjutnya Hasil Uji Chow disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Wilayah	Signifikansi
Kawasan Indonesia Barat	0.0000
Kawasan Indonesia Timur	0.0000
Indonesia	0.0001

Uji *Chow* dilakukan untuk menentukan model terbaik antara common effect model dengan *fixed effect model*. Hasil uji *chow* jika nilai Prob>F kecil dari 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Uji chow pada ketiga kawasan menunjukkan hasil bahwa nilai Prob>F sebesar 0.0000<0.05. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima karena nilai probabilitas uji *chow* lebih kecil dari 0.05 sehingga model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya Hasil Uji Hausman disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji *Hausman*

Wilayah	Signifikansi
Kawasan Indonesia Barat	0.2748
Kawasan Indonesia Timur	0.2216
Indonesia	0.0227

Pada Uji *hausman* dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *random effect model* dan *fixed effect model*. Hasil uji *hausman* jika nilai Prob>F kecil dari 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Uji Hausman pada Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur menunjukkan hasil bahwa nilai Prob>F sebesar 0.2748 dan 0.2216 >0.05. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak karena nilai probabilitas uji *hausman* lebih besar dari 0.05 sehingga model terbaik yang terpilih pada dua kawasan tersebut adalah *Random Effect Model*. Hasil uji hausman di Indonesia adalah 0.0227 < 0.05, hasil ini dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan model terpilih pada Indonesia adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya Hasil Uji LM disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji *LM*

Wilayah	Signifikansi
Kawasan Indonesia Barat	0.0000
Kawasan Indonesia Timur	0.0000
Indonesia	-

Uji *Lagrange Multiplier* (*LM*) dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *common effect model* dengan *random effect model*. Hasil uji *LM* jika nilai Prob>F kecil dari 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kawasan Indonesia Barat dan Timur menunjukkan hasil bahwa nilai Prob>F sebesar 0.0000<0.05. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima karena nilai probabilitas uji *LM* lebih kecil dari 0.05 sehingga model terbaik yang

terpilih adalah Random Effect Model. Dikarenakan pada Uji Hausman Indonesia nilai probabilitasnya 0.0227 maka metode terpilihnya adalah *fixed effect model*, dan tidak diperlukan lagi melakukan Uji *LM*. Berdasarkan hasil uji pemilihan model terbaik, maka ditemukan bahwa model regresi data panel pada Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur adalah analisis regresi data panel *Random Effect Model*, dan pada Indonesia adalah analisis regresi data panel *Fixed Effect Model*. Dikarenakan model terpilih pada Indonesia adalah *Fixed Effect Model*, maka diperlukan untuk melakukan Uji Asumsi Klasik pada kawasan ini. Berikut hasil dari Uji Asumsi Klasik di Indonesia pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik Indonesia

Uji Asumsi Klasik	Nilai Statistik	Probabilitas	Keterangan
Uji Multikolinearitas	Vif = 1.47	-	Tidak terjadi Multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas	Chi2 = 0.6694	0.6694	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Uji Autokorelasi	Prob= 0.000	0.000	Terdapat Autokorelasi

Berdasarkan Hasil Uji Asumsi klasik Indonesia pada tabel 4, dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF rata-rata sebesar 1.47 yang berada di bawah ambang batas 10, serta tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai probabilitas uji heteroskedastisitas sebesar 0.6694 > 0.05. Namun, ditemukan adanya autokorelasi karena nilai probabilitas sebesar 0.000 < 0.05, yang menunjukkan pelanggaran terhadap asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Autokorelasi dapat menyebabkan varians dari estimasi menjadi tidak efisien dan kesalahan standar menjadi bias. Untuk mengatasi masalah autokorelasi pada model *Fixed Effect* agar hasil estimasi tetap BLUE, pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan metode robust *standard error* atau *clustered robust standard error*. Metode ini akan menghasilkan *standard error* yang tahan terhadap autokorelasi dan heteroskedastisitas, sehingga parameter regresi tetap dapat diinterpretasikan secara valid. Tahapan terakhir adalah melakukan uji hipotesis yang mana pada tahapan ini dilakukan uji-f dan uji-t statistik. Berikut hasil uji hipotesis pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji F

Kawasan	F-Statistic	Prob(F-Statistic)
Kawasan Indonesia Barat	37.83	0.0000
Kawasan Indonesia Timur	92.22	0.0000
Indonesia	36.67	0.0000

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai f-statistik pada Kawasan Indonesia barat adalah 37.83 dengan probabilitas 0.0000 < 0.05. Pada Kawasan Indonesia Timur diperoleh nilai f-statistik sebesar 92.22 dengan nilai probabilitas 0.0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Nilai F-statistik pada hasil uji F di Indonesia adalah sebesar 36.67 dengan nilai probabilitas 0.0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi. Dapat disimpulkan bahwa keempat variabel bebas, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, pengangguran, dan pendidikan, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Indonesia Timur. Uji t-statistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut ini adalah hasil uji t yang diperoleh dari hasil regresi pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji T

Variabel	Kawasan Indonesia Barat		Kawasan Indonesia Timur		Indonesia	
	t-stat	Prob	t-stat	Prob	t-stat	Prob
Inklusi Keuangan	4.16	0.000	4.68	0.000	2.73	0.010
Pendidikan	-4.03	0.000	-9.17	0.000	-5.15	0.000
Pertumbuhan Ekonomi	2.2	0.028	-0.89	0.373	-0.53	0.597
Pengangguran	-0.45	0.649	-2.26	0.024	-2.68	0.012

Berdasarkan dati tabel 6, dapat dilihat bahwa hasil Uji-t diperoleh pada Kawasan Indonesia Barat nilai Probabilitas variabel inklusi keuangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi <0.05 yang mana nilainya >1.96 sehingga dapat diartikan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variael ketimpangan pendapatan pada Kawasan Indonesia Barat. Pada Kawasan Indonesia Timur dan Indonesia dapat dilihat bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan adalah Inklusi Keuangan, pendidikan, dan Pengangguran.

Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel Kawasan Indonesia Barat, Timur, dan Indonesia

Variabel	Kawasan Indonesia Barat		Kawasan Indonesia Timur		Indonesia	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	-0.127116	0.090	0.313510	0.000	0.098239	0.424
Pertumbuhan Ekonomi	0.001885	0.028	-0.000365	0.373	-0.000182	0.597
Inklusi Keuangan	0.151313	0.000	0.149287	0.000	0.365682	0.010
Pengangguran	-0.000731	0.649	-0.044237	0.024	-0.004223	0.012
Pendidikan	-0.026620	0.000	-0.697713	0.000	-0.036891	0.000

Hasil regresi pada Kawasan Indonesia Barat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam model ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisiennya sebesar 0.0018851 dengan p-value 0.028 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.0019. Hasil positif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpotensi memperbesar ketimpangan apabila hasil dari pertumbuhan tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat atas. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu akan memperlebar ketimpangan pendapatan di suatu daerah [19].

Pada Kawasan Indonesia Timur dan Indonesia secara nasional, hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini disimpulkan dari hasil probabilitias 0.373>0.05 dengan koefisien -0.000365 pada KIT dan nilai probabilitas sebesar 0.597 > 0.05 dengan koefisien regresi sebesar -0.000182 pada Indonesia. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa ketimpangan pendapatan di Kawasan Indonesia Timur tidak disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi.

Pada Kawasan Indonesia Barat, Timur, dan Indonesia, hasil regresi data panel menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas masing-masing kawasan <0.05 yaitu 0.000, dengan koefisien regresi 0.151313, 0.149287, dan 0.365682. Dapat diartikan bahwa setiap peningkatan inklusi keuangan sebesar 1 satuan akan meningkatkan ketimpangan pendapatan di KIB 15.13%, KIT 14.93% dan Indonesia sebesar 36.57%.

Peningkatan terhadap indeks inklusi keuangan malah meningkatkan ketimpangan pendapatan. Kondisi ini terjadi karena kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses layanan keuangan formal, seperti keterbatasan jaminan, kurangnya informasi, serta minimnya kapasitas usaha. Sehingga mengakibatkan mereka tidak memperoleh manfaat yang signifikan dari peningkatan inklusi keuangan [20]. Jika layanan keuangan lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, berpenghasilan besar, atau tinggal di daerah perkotaan, maka manfaatnya akan lebih terkonsentrasi pada kelompok tersebut.

Pada Kawasan Indonesia Barat, dapat dilihat bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan probabilitas > 0.05 yaitu 0.649. Pengangguran tidak berpengaruh terjadap ketimpangan pendapatan, dimana berapapun angka pengangguran tidak akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Pada Kawasan Indonesia Timur dan Indonesia, pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai probabilitas < 0.05 yaitu 0.024 dan 0.012. Hasil regresi Random Effect Model pada KIT menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengangguran sebesar 1 satuan maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.044237 atau 4.42%, sementara di Indonesia peningkatan pengangguran sebesar 1 satuan akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.42%. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena banyak pengangguran di Indonesia, termasuk di Kawasan Indonesia Timur, masih tetap memiliki aktivitas ekonomi, seperti menjalankan usaha sendiri, bekerja di sektor informal, bekerja paruh waktu, atau mendapatkan dukungan keluarga.

Hasil regresi data panel pada Kawasan Indonesia Barat, Timur, dan Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan probabilitas 0.000 dan nilai koefisien masing-masing sebesar -0.026620, -0.697713, dan -0.036891. Dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam indikator pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah, maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.0266 di KIB, 0.6977 di KIT, dan 0.0369 di Indonesia. Semakin lama penduduk menempuh pendidikan formal, semakin besar kemungkinan mereka memperoleh keterampilan dan kemampuan kerja yang lebih baik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan secara lebih merata.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Kawasan Indonesia Barat, Kawasan Indonesia Timur, dan Nasional. Dapat disimpulkan bahwa variabel yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Kawasan Indonesia Barat secara signifikan adalah inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan, sedangkan di Kawasan Indonesia Timur dan Indonesia, variabel yang signifikan adalah pendidikan dan pengangguran, dengan inklusi keuangan tetap menunjukkan kecenderungan memperbesar ketimpangan meskipun aksesnya masih terbatas. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pengurangan ketimpangan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing, agar lebih efektif dan kontekstual. Berdasarkan temuan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan di Kawasan Indonesia Barat dan tidak signifikan di Kawasan Indonesia Timur mengindikasikan bahwa arah pembangunan ekonomi belum merata. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berorientasi pemerataan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis wilayah. Kebijakan pengurangan ketimpangan pendapatan tidak bisa disamakan antara Kawasan Indonesia Barat dan Timur. Diperlukan intervensi yang spesifik dan berbasis data, yang mengedepankan inklusivitas dalam keuangan, pemerataan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan peran ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan yang berkeadilan sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan variabel yang dianalisis, seperti menambahkan variabel yang berpotensi memengaruhi ketimpangan pendapatan secara lebih kompleks.

Daftar Rujukan

[1] Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, *1*(4), 243-258. DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29 .

[2] Rohani, R., & Jusman, I. A. (2021). Causality: Poverty, Income Inequality, and Economics Growth. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *1*(9), 1859-1864. DOI: https://doi.org/10.47492/jip.v1i9.303 .

[3] Juniati, W., Abdullah, M.L., Wibowo, M.G. (2022) Determinants of Income Inequality Villages and Cities in Indonesia. *Journal of Developing Economies*, *7*(2), 266-279. DOI: https://doi.org/10.20473/jde.v7i2.33980 .

[4] Suryani, K. G., & Woyanti, N. (2021). The Effect of Economic Growth, HDI, District/City Minimum Wage and Unemployment on Inequity of Income Distribution in Province of DI Yogyakarta (2010-2018). *Media Ekonomi dan Manajemen*, *36*(2), 170-180. DOI: http://dx.doi.org/ 10.24856/mem.v36i2.1990 .

[5] Amaluddin, A., Hanoeboen, B. R. A., & Ramly, A. (2020). Determinan Sosial Ekonomi Kesenjangan Distribusi Pendapatan Penduduk di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Paradigma*

Ekonomika, *15*(1), 39-50. DOI: https://doi.org/10.22437/jpe.v15i1.9218 .

[6] Julihanza, A., & Khoirudin, R. (2023). Determinan Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Sumatera. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, *1*(2), 1–12. DOI: https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i2.93 .

[7] Alin, N. F., Heriberta, H., & Umiyati, E. (2019). Fakta Empiris Kurva U-Terbalik Kuznets Mengenai Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *14(*1), 9-16. DOI: https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6788 .

[8] Doğan, E., & Güler, C. (2021). An Analysis of the Impacts of Financial Inclusion on Income Inequality in the Fragile Five Countries. *Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi*, *43*(1), 1-20. DOI: https://doi.org/10.14780/muiibd.960047 .

[9] Esquivias, M. A., Sethi, N., & Iswanti, H. (2021). Dynamics of income inequality, investment, and unemployment in Indonesia. *Journal of Population and Social Studies [JPSS]*, *29*, 660-678. DOI: http://doi.org/10.25133/JPSSv292021.040 .

[10] Purba, S. F., Khotimah, H., Suli, A. A., & Wahyuningsi, M. (2024). The Impact of Educational Conditions on Income Inequality and Economic Growth in South Sumatra. *KnE Social Sciences*, 261-276. DOI: https://doi.org/10.18502/kss.v9i14.16104 .

[11] Wędrowska, E., & Muszyńska, J. (2022). Role of Age and Education As the Determinant of Income Inequality in Poland: Decomposition of the Mean Logarithmic Deviation. *Entropy*, *24*(6), 773. DOI: https://doi.org/10.3390/e24060773 .

[12] Alamanda, A. (2021). The Effect of Economic Growth on Income Inequality: Panel Data Analysis From Fifty Countries. *Info Artha*, *5*(1), 1-10. DOI: https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1176 .

[13] Banna, H., Masud, M. M., & Rodrigo, S. K. (2020). How Does Economic Growth Impact on Income Inequality Across Ethnic Groups in Malaysia?. *Poverty & Public Policy*, *12*(4), 397-420. DOI: https://doi.org/10.1002/pop4.293 .

[14] Erlando, A., Dwi, F., & Masakazu, S. (2020). Heliyon Financial Inclusion , Economic Growth , and Poverty Alleviation : Evidence From Eastern Indonesia. *Heliyon*, *6*(10). DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235 .

[15] Çaliş, N., & Gökçeli, E. (2022). The Relationship Between Financial Inclusion and Income Inequality; Evidence From Turkiye. *Journal of Management & Economics Research*, *20*(4). DOI: https://doi.org/10.11611/yead.1177426 .

[16] Ashari,N. R.,Gunawan, S., Irwan W., Nilawati.(2024). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains,13*(2). DOI: https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i2.25139 .

[17] Agustin, P. M., Romadona, D., Thoriqi, M., & Fadlilatunnisa, U. (2024). Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, *3*(1), 169-175. DOI: https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i1.2774 .

[18] Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, *3*(4), 9-16. DOI: https://doi.org/10.24036/jkep.v3i4.12375 .

[19] Andaiyani, S., Adnan, N., Yunisvita, Y., & Riswan, M. (2022). Does Financial Inclusion Reduce Income Inequality In South Sumatra, Indonesia ?. *Jed*, *4*(1). DOI: https://doi.org/10.20414/jed.v4i1.4853 .

[20] Amali, F. N. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *3*(1), 815-820. DOI: https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15424 .